

Mawardi Yahya Irup Penurunan Bendera di Griya Agung



Upacara Penurunan bendera HUT RI ke 78 yang diadakan di Griya Agung, Kamis (18/8) sore berlangsung dengan sukses dengan inspektur upacara (Irup) Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Ir H Mawardi Yahya.

Pada upacara penurunan bendera merah putih kali ini bertindak sebagai komandan upacara AKBP Haris Dinzah, Alumni Kepolisian Tahun 2005, dan Jabatan sehari-sehari sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Palembang.

Sedangkan yang bertindak sebagai pembawa baki Zulaikha Rivera Ahmad. Sementara tiga orang pengerek penurunan bendera masing-masing Raffi Aidil Putra Hadinata, Muhammad Davin Al Rasya dan Ganau Fernando.

Usai menjadi Irup, Wagub Mawardi Yahya menegaskan sudah lima tahun dirinya bersama Gubernur H Herman Deru menjadi Irup Upacara baik menaikkan bendera maupun upacara penurunan bendera.

Selama lima tahun tersebut



lanjut Wagub, Pemprov Sumsel telah berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Sumsel termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana pembangunan fisik dan non fisik.

“Selama lima tahun kami berdua bersama pak Gubernur Herman Deru memimpin tentu ada kekurangan. Ada yang belum pas. Untuk itu Bapak Herman Deru bersama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya,” ucap Wagub.

Mawardi Yahya menyebut selama kurun lima tahun jabatannya bersama Gubernur

Herman Deru, telah berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumsel.

“Selama jabatan ini tekad kami dapat memenuhi keinginan dan cita-cita masyarakat. Tapi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami,” tutupnya.

Sebelumnya upacara penurunan bendera dimulai, para tamu undangan menyaksikan sejumlah atraksi Marching Band, paduan suara lagu-lagu perjuangan yang dinyanyikan para siswa SMA/SMK se Sumsel. (*)



Tim pengibaran bendera merah putih di Istana Kepresidenan pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada Kamis (17/8/2023) telah ditentukan. Tim Indonesia Maju, demikian nama yang disematkan, didaulat untuk bertugas pada upacara pagi hari ini.

Berdasarkan keterangan Biro Pers Dan Media Istana, Kamis (17/8/2023), Lilly Indriani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih. Saat ini, ia menempuh pendidikan di SMAN 1 Wamena.

Tiga lainnya dari Kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Bintang Wirasatya RA sebagai Komandan Kelompok 8 yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Nathaniel Shawn Edgar Sondakh sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara, dan Alfin Alfarisi sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, Kolonel Arm Joko Setiyo Kurniawan didapuk menjadi Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Danmen Armed 2/PY/2 Kostrad.

Bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka ialah Kapten Mar Ganteng Prakoso. Saat ini, ia bertugas sebagai Danki A Yonif 7 Mar Brigif 4 Mar BS Kormar.

Adapun bertindak sebagai Perwira Upacara ialah Brigjen TNI



Lilly Wenda, Perwakilan Papua Terpilih Membawa Bendera Merah Putih

Arkamelvi Karmani. Pria kelahiran 10 Februari 1967 tersebut, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/ Jakarta. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989.

Paskibraka 2023 yang anggotanya berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia sebelumnya telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 15

Agustus 2023, di Istana Negara, Jakarta. Sebanyak 76 pemuda telah mengucapkan Ikrar Putra Indonesia dan siap untuk menjalankan tugasnya pagi ini.

(trt)

Keyla Azzahra, Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera HUT 78 RI



Keyla Azzahra Purnama asal SMA Negeri 4 Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, terpilih jadi pembawa baki dalam upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2023).

Total ada 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang terpilih dari 38 provinsi di Indonesia. Seluruh putra dan putri daerah ini mewakili tiap daerahnya.

Keyla Azzahra mewakili kota Lubuklinggau di kancah nasional HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Hampir 13 tahun Kota Lubuklinggau tidak mengirim utusan Paskibraka tingkat nasional. Terakhir, Kota Lubuklinggau mengirim perwakilan pada 2010.

Keyla dan anggota lainnya sudah dikukuhkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi anggota Paskibraka 2023 pada Selasa (15/8/2023).

Keyla yang duduk di bangku kelas 10 SMA punya hobi berolahraga. Sejak sekolah di SMP Negeri 2 Lubuklinggau, Keyla sudah aktif jadi atlet voli.

Dalam momen penurunan bendera pusaka sore ini, ada tiga orang lainnya yang bertugas yakni Frans Timothy Prawira Siallagan yang mewakili Provinsi Lampung. Lalu, Made Made Guruh Anggara Putra sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Bali dan Raja Shiam Al Ghiffary Panjiyoga sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat. (*)

Rebutan Kursi di Senayan



Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Sumatera Selatan (Sumsel) bakal diramaikan dengan deretan nama politisi ternama di Sumsel yang akan berebut kursi di Senayan.

Beberapa bakal calon legislatif (Bacaleg) daerah pemilihan (dapil) 1 Sumsel di antaranya Ketua DPRD Sumsel Anita Noerenghati dari Partai Golkar, Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo dari Partai Demokrat, Wako Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe dari PKB dan Muhammad Yaser, menantu Gubernur Sumsel Herman Deru dari Partai Nasdem.

Di Dapil 2, Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramandha N Kiemas juga sudah mendaftarkan diri sebagai bacaleg dari PDIP, lalu ada mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji melalui PKB serta mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol (Purn) Zulkarnain Adinegara dari Partai Perindo.

Terdapat pula anak pejabat yang ikut meramaikan bursa bacaleg DPR RI, yakni Samantha Tivani dari Partai Nasdem, yang merupakan putri Gubernur Sumsel Herman Deru. Serta ada AW Noviadi dari Partai Gerindra, mantan Bupati Ogan Ilir yang juga anak Wagub Sumsel Mawardi Yahya.

Giri Ramandha N Kiemas yang juga Ketua DPW Sumsel PDIP sempat mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD Sumsel, untuk menjadi calon wakil gubernur (Cawagub) Sumsel 2018 mendampingi calon gubernur (Cagub) 2018, Doddy Reza Alex Noerdin.

Walau harus menelan kekalahan, dia pun kembali bangkit dan menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel

periode 2019-2024.

Dari hasil survei Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) selama setahun terakhir, nama Giri Ramandha N Kiemas paling banyak dicari.

Giri Ramanda berujar, alasannya untuk maju jadi bacaleg Dapil Sumsel 2 membawa bendera PDIP, karena mempunyai alasan kuat. Yakni aturan PDIP yang mengisyaratkan jika lebih dari 3 periode, maka harus ada izin dari Ketua Umum PDIP Sumsel.

"Saya sudah 4 periode di provinsi dan selama ini memang tidak bisa maju ke RI, karena ada aturan jika orangtua, istri dan anak tidak boleh pada tingkatan yang sama. Tahun 2019 lalu, almarhum bapak (Nazaruddin N Kiemas) masih ikut pencalegan,

walaupun beliau meninggal dunia sekitar 3 minggu sebelum pemilihan," katanya, Selasa (8/8/2023).

Dalam Pileg 2024 mendatang, PDIP Sumsel mempunyai target 4 kursi DPR RI, 15 kursi DPRD Provinsi dan 120 kursi DPRD kabupaten/kota di Sumsel.

"Siapa yang nanti diunggulkan, tidak ada. Karena semua caleg diharapkan bergerak maksimal. Seperti petahana Yulian Gunhar dan Riezky Aprilia," ujarnya.

Lalu ada juga adik ipar Gubernur Sumsel Herman Deru yakni Kolonel (Purn) Ruslan, Henny Astuti, Amirul dan lainnya. Para pengurus PDIP Sumsel juga turut menyalonkan diri jadi bacaleg, di seperti MA Gantada Septiatirin dan Ryonaldo Juliantino.

Arianto, Direktur Eksekutif LKPI tergabung dalam Perkumpulan Survey Opini Publik Indonesia (Persepi) berkata, kehadiran partai-partai baru memang agak sulit untuk bersaing dengan partai besar yang lebih dulu ada, apalagi untuk mengenalkan para bacalegnya.

Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Partai Perindo besutan Hary Tanoesudibjo, yang sedang mengalami kenaikan tren di Sumsel. Salah satu bacaleg dari Partai Perindo adalah Irjen Pol (Purn) Zulkarnain Adinegara di Dapil 2 Sumsel.

"Caleg Perindo berpeluang besar dapat satu dapil, karena trennya cukup bagus. Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh mantan Kapolda Sumsel," ujarnya. (L6)

HD Pilih Pilgub Ketimbang Nyaleg



Jabatan Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) akan habis per tanggal 1 Oktober 2023 dan akan digantikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumsel yang akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sebagai kader dan Ketua DPW Partai Nasional Demokrat

(Nasdem), dia digadagadangkan akan kembali mengikuti bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumsel di 2024 mendatang.

Sayangnya, jalannya menuju pencalonan sebagai Gubernur Sumsel periode kedua akan sedikit terhambat.

Pasalnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya

Paloh, sudah memandatkan agar Herman Deru menyalonkan diri di Pemilihan Legislatif (Pileg) di daerah pemilihan (dapil) 2 DPR RI dari Sumsel.

Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatra III DPP Partai Nasdem Fauzi H Amro, selain Herman Deru, kepala daerah lain yang masa jabatannya habis, wajib mendaftarkan diri di Pileg

2024 mendatang.

Apalagi Herman Deru sudah meninggalkan kursi jabatannya sebagai Gubernur Sumsel di Oktober 2023 nanti, sehingga potensi untuk memenangkan kontestansi Pileg 2024 akan berpeluang besar.

"Kurang lebih hampir 1 tahun Pak Gubernur tidak menjabat lagi sebagai gubernur. Dia kan ketua DPW, saran Ketum (Surya Paloh), wajib mencalonkan diri di DPR RI Sumsel II," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut yakin, dengan keikutsertaan Herman Deru di Pileg 2024 mendatang, bisa menambah perolehan kursi untuk ke parlemen. Partai Nasdem sendiri menargetkan Dapil Sumsel 1 meraih 2 kursi dan Dapil 2 Sumsel mengantongi 3 kursi.

Nama besar Herman Deru juga dipercaya bisa meraih simpati masyarakat Sumsel, untuk memilihnya menjadi wakil rakyat. Mantan Bupati Ogan Komering

Ulu (OKU) Timur itu juga, akan semakin menyemangati kader-kader lainnya kemenangan Partai Nasdem di Pileg 2024.

Namun sayangnya, keinginan Surya Paloh tersebut tidak diamini oleh Herman Deru. Dia lebih tertarik untuk bersaing di Pilkada 2024, meraih kembali posisi sebagai Gubernur Sumsel periode 2024-2029 bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumsel Mawardi Yahya.

"Bukan bicara mau tidak mau, saya kan sudah mencalonkan anak saya (di dapil 2). Tapi ini ambil alternatifnya dengan mencalonkan anak saya," kata Herman Deru.

Anaknya, Samantha Tivani Herman Deru-lah yang didapuk oleh DPW Partai Nasdem Sumsel, untuk mengisi kursi bacaleg di Dapil 2 DPR RI. Lalu ada juga adik iparnya, Kolonel TNI (Purn) Ruslan, yang siap menjadi bacaleg DPR RI di Dapil 2 dari Partai Nasdem. (*)

Status KEK TAA Dihapus Dicabut

DPRD Sumsel Segera Datangi Kemehub

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk mengeluarkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) atau Tanjung Carat dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2022.

Keputusan ini diambil karena proyek tersebut dianggap tidak memiliki progres yang signifikan hingga saat ini. Namun, anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) tetap memperjuangkan agar pembangunan KEK TAA tetap menjadi prioritas.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki, mengungkapkan bahwa meskipun KEK TAA tidak lagi masuk dalam proyek strategis nasional, pihaknya akan berupaya untuk memastikan bahwa pembangunan KEK TAA tetap mendapat dukungan.

"Tahun 2023 ini, kami belum mendapatkan informasi mengenai alokasi anggaran APBN untuk KEK TAA. Namun, kami mendengar bahwa ada alokasi



setiap tahunnya, meskipun tidak masuk dalam proyek strategis nasional. Kami tetap berharap pemerintah akan memberikan dukungan, meskipun kami belum mengetahui jumlah anggaran yang akan dialokasikan," ungkap Hasbi Asadiki.

Sebagai informasi, anggaran dari APBN sebelumnya telah digunakan untuk mendukung pembangunan pelabuhan di KEK TAA. "Terdapat pelabuhan penyeberangan ke Bangka dan pelabuhan Tanjung Carat, yang diperuntukkan sebagai Dermaga

Internasional," tambahnya.

Setelah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun 2024 selesai, Hasbi Asadiki menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait. "Ya nanti akan kita datangi kementerian terkait," singkatnya.

Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai

kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. DPRD Sumsel berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan KEK TAA masih tetap menjadi perhatian utama, meskipun telah dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional. (rml)

Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono menilai harga Elpiji di Indonesia sangat tidak realistis dan carut marut dibawah kelola manajemen Pertamina.

Sebagai penghasil gas terbesar di Asia, ia menduga ada pihak tertentu yang menginginkan masyarakat tetap menggunakan gas elpiji yang harganya bisa dipermainkan.

"Saat ini harga Gas Elpiji 3kg tabung melon HET sudah mencapai 25.000 rupiah di tahun 2023 padahal di tahun 2014 harga HET Elpiji 3 kg masih berada di Rp 13.500, berarti terjadi kenaikan 85% selama kurun waktu tidak lebih dari 10 tahun. Ini tidak masuk akal!" kata Bambang Haryo

Menurut anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, harga gas elpiji di sebagian besar luar Jawa bisa mencapai diatas Rp 40.000 seperti misalnya Sidrap Sulawesi mencapai Rp 40.000 dan Kutai Timur Kalimantan mencapai Rp 50.000.

"Pertamina sebagai penyuplai gas elpiji dan bahan bakar secara monopoli mendapatkan subsidi pemerintah berupa PNM dari APBN sebesar Rp 82,3 triliun di tahun 2023. Seharusnya suplai elpiji ke seluruh Indonesia tidak boleh terkendala dari sisi biaya, apalagi saat ini juga ada tol laut yang bisa digunakan untuk pengiriman elpiji menjadi jauh lebih murah. Seharusnya tidak boleh ada disparitas harga di Jawa dan luar Jawa," ujar pria yang disapa BHS itu.

Harga Gas Elpiji Dinilai Tak Realistis



Bambang Haryo Soekartono.

Alumni ITS Surabaya ini mengungkapkan, Elpiji 3kg ini banyak digunakan oleh usaha mikro kecil yang di Indonesia berjumlah sekitar 25 juta usaha mikro dan dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah yang berjumlah sekitar 110 juta di Indonesia (data BPS). Ini sangat memberatkan masyarakat bawah dan bahkan untuk masyarakat menengah ke atas pun mereka diberikan beban penggunaan elpiji isi ulang 5,5 kg dengan harga sekitar 110.000 rupiah dan 12 kg sebesar 240.000 rupiah.

"Berbeda dengan di Malaysia harga elpiji isi ulang 16kg sebesar 25,8 ringgit atau setara dengan Rp 90.300 di Kota Kuala Lumpur, Perak, Pulau Pinang, Terengganu,

Pahang, dan lain lain, sehingga harga elpiji di Malaysia per kilonya sebesar Rp 5.600, maka jika ada elpiji 3kg di Malaysia harganya sebesar Rp 16.900, padahal harga tersebut bukan harga subsidi di Malaysia, dimana Malaysia mengikuti harga pasar internasional. Bahkan harga di Malaysia bagian Pulau Kalimantan di Kota Kinabalu dan Serawak sampai ke pelosok-pelosok harganya berbeda tidak lebih dari 1 ringgit. Sehingga hampir dikatakan harga adalah sama di seluruh wilayah Malaysia sampai ke pedalaman," kata BHS.

Petronas, kata mantan ketua bidang Infrastruktur KADIN Pusat ini mengatakan sebagai perusahaan milik negara tidak diberikan satu monopoli dan semua penyuplai BBM yang ada di negara tersebut baik Shell, Petron, dan lain lain mereka juga menjual gas kepada masyarakat publik dengan harga yang sama seperti yang berlaku di perusahaan negara Petronas, bahkan Petronas dan semua perusahaan penyuplai gas tersebut tidak mendapatkan subsidi dari negara.

"Padahal Malaysia itu sendiri mengimpor gas elpiji dari negara yang sama dengan Indonesia yaitu dari USA, Arab, Qatar, Angola, Kuwait dan Singapura. Di Malaysia tabung elpiji 16kg hanya

digunakan oleh UMKM /usaha mikro makanan di kedai-kedai kecil di pasar tradisional termasuk pedagang kaki lima yang ada di Malaysia. Sedangkan untuk semua pemukiman rakyat di Malaysia sampai ke pelosok sudah teraliri dengan jaringan gas 100% dengan harga yang jauh lebih murah dari penggunaan elpiji dan bahkan mendekati gratis hanya membayar service charge saja dengan penggunaan gas yang tidak dibatasi" imbuhnya.

Sedangkan di Indonesia, hampir 100% pemukiman masih belum difasilitasi jaringan gas, sehingga mereka harus menggunakan tabung elpiji untuk kebutuhan rumah tangganya.

BHS mengungkapkan, Jaringan gas yang sudah dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda masuk ke sebagian besar perumahan perumahan di kota kota besar seperti : Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan lain lain sudah tidak difungsikan dan bahkan jaringan gas saat ini di Indonesia baru menjangkau tidak lebih dari 1% jumlah rumah penduduk di Indonesia. Padahal Indonesia bisa dikatakan penghasil gas terbesar di Asia dan bahkan China, Jepang, Korea, Singapura pun memasok gas dari Indonesia.

(rml)

Suara Senyap Islam Politik di Pilpres 2024

Oleh : Dr. Abdul Mukti Ro'uf, MA



Gemuruh „suara syariah” dari kalangan Islamis-Transnasional begitu pada hajatan di Pilkada DKI 2016 dan Pilpres 2019. Sosok Anies Baswedan di Pilkada DKI delapan tahun silam benar-benar menjadi aktor representatif dari capaian perjuangan Islam politik yang dimotori oleh PKS sebagai partai dan kekuatan civil society seperti GNPf-MUI dan FPI (kini telah dibubarkan), serta beberapa elemen kaum miskin kota yang berhasil melebur untuk kepentingan elektoral.

Vedi R Hadiz menyebut bahwa fenomena Pilkada DKI dan gerakan Islam politik sebagai new islamic populism.

Menjelang Pilpres 2024

Posisi oposisi Partai Demokrat hampir sepuluh tahun terakhir sejatinya bukan pilihan sadar. Secara politik lebih disebabkan karena „kecelakaan” akibat hubungan SBY dan Megawati yang tidak harmonis hingga jelang Pilpres 2024 dengan seluruh sebab-musababnya. Pertemuan Ketum Demokrat AHY dan Puan Maharani tidak mudah disimpulkan hingga sampai pada level kerja sama politik keduanya di Pilpres 2024.

Perjumpaan itu baru dinilai baik untuk menunjukkan fatsun politik elite di mata publik. Demokrat dan PDIP sama-sama diuntungkan sebagai partai yang terbuka. Sementara, secara ideologis, posisi oposisi PKS lebih persisi dibanding Demokrat. Ideologi PKS jelas sebagai partai „Islamis-Transnasional” yang sejak awal berposisi dengan ideologi PDIP sebagai partai „nasionalis-kiri”.

Narasi kritik PKS terhadap kepemimpinan Jokowi sangat mudah dibaca sebagai aspirasi Islamis di mana Jokowi ditempatkan sebagai sosok yang „jauh” dari aspirasi Islam versi PKS. Jadi, kekentalan oposisi PKS jauh lebih bernilai ideologis ketimbang Partai Demokrat. Jika ditarik ke delapan tahun silam, PKS-lah yang paling representatif mewakili „Islam politik” dan berhasil mengguburnurkan Anies Baswedan.

Bagaimana dengan Partai Nasdem? Partai ini makin ambigu jika hendak ditempatkan dalam aspirasi Islam politik. Sama dengan Partai Demokrat yang berideologi nasionalis dengan slogan restorasi. Kedua partai ini, Demokrat dan Nasdem sama sekali bukan menjadi bagian dari perjuangan Islam politik sebagaimana PKS. Dalam koalisi perubahan, yang bisa diidentikkan dengan aspirasi Islam politik hanya PKS dan Anies dengan seluruh latar belakang dan rekam jejaknya.

Sampai di sini, aspirasi Islam politik tidak bisa diidentikkan dengan Koalisi Perubahan meski di dalamnya terdapat PKS dan sosok Anies. Ditambah, sejauh ini, hanya Nasdem yang „lebih berkuasa” dalam mengelola Anies

dibanding PKS dan Demokrat. Oleh karenanya bisa dipahami mengapa tidak ada suara nyaring yang menyangkut aspirasi Islam politik di tubuh koalisi perubahan.

Kritik-kritik dari anggota koalisi perubahan terhadap pemerintah sepi dari narasi keagamaan sebagaimana narasi yang dibangun di Pilpres 2019. Di satu sisi menjadi baik untuk menghindari polarisasi yang menegangkan, tapi di sisi lain terjadi pelemahan di barisan Islam politik.

Islam Politik Non Partai

Para aktivis gerakan Islam politik non-partai, sejauh ini belum bersuara --tidak seperti pada gelaran Pilpres 2019. Sunyinya „suara syariah” dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang bisa diduga karena beberapa alasan. Pertama, tidak ada pemicu yang signifikan sebagai pintu masuk untuk berbicara lantang seperti keseleonya lidah Ahok di Kepulauan Seribu. Masifikasi gerakan sosial yang dipicu oleh kekuatan media sosial menjadi fenomena yang tidak mungkin diulang untuk kebutuhan Pilpres 2024.

Kedua, terjadi faksionisme di tubuh eksponen Islam politik yang tergabung dalam GNPf-MUI yang bermetamorfosis ke dalam PA 212. Kekuatan ini sedikit banyak telah kehilangan soliditasnya dalam memperjuangkan aspirasi Islam politik. Selain tokoh sentralnya, Rizieq Shihab yang memiliki keterbatasan dalam panggung-politik, beberapa isunya kurang mendapat perhatian publik.

Bisa jadi, bagi para aktivis, anggota, dan simpatisan Islam politik sedang berpikir ulang: apakah akan maju secara frontal atau memilih „berdiam” sejenak untuk menemukan momentum yang belum tau apa dan kapan dan secara diam-

diam „menyelinap” masuk untuk sebuah kemenangan.

Anies atau Prabowo?

Secara terang-terangan atau samar-samar, „suara syariah” akan jauh lebih identik ke Anies Baswedan. Hal ini menjadi historis dengan perjalanan PKS dan Anies. Hubungan antarpolisi koalisi bisa bertemu dan berkomunikasi layaknya partai meski di belakangnya menyimpan perbedaan ideologi. PKS dan Anies sangat mudah bertemu.

Nasdem dan Anies memiliki sejarah pendirian ormas Nasdem. Yang sedikit berbeda hanya Demokrat. Kecuali dengan PKS karena senasib sesama oposisi. Itu sebabnya--disadari atau tidak--dalam bangunan koalisi perubahan sering terjadi perbedaan antara Nasdem dan Demokrat terutama perihal siapa cawapres Anies. Meski demikian, ketiganya telah diikat dalam piagam perjanjian koalisi.

Sekarang bagaimana dengan Islam politik non partai? Dukungan habis-habisan terhadap Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 karena ambisinya dalam menumbangkan Jokowi yang diposisikan dan dipersepsi sebagai „di luar” Islam. Kini Prabowo--apakah merupakan kecerdasannya atau kecerdasan Jokowi--telah menjadi bagian dari Jokowi. Bahkan belakangan dipersepsi sebagai penerus Jokowi selain Ganjar Pranowo.

Maka tidak ada jalan lain kecuali harus berlabuh ke Anies meskipun harus diakui akan ada semacam hambatan psikologis karena formula koalisi. Para aktivis Islam politik non partai ini sejak awal tidak menaruh investasi signifikan dibanding Partai Nasdem yang justru berhaluan nasionalis-pluralis. Ada semacam ketidaknyambungan ideologis yang menjadikan kelompok-kelompok ini terkesan

maju-mundur untuk bersuara lantang.

Sekarang, bagaimana jika terjadi tiga pasangan capres-cawapres dengan asumsi Anies belum berhasil masuk dalam putaran kedua? Apakah pilihan untuk berlabuh ke Prabowo akan menjadi pilihan rasional? Bagi partai politik semacam PKS tidak ada soal. Tetapi bagi kekuatan Islam politik non partai harus berpikir ulang karena posisi ideologisnya yang akan selalu oposan dengan Jokowi dan PDIP.

Di samping itu, jika PKB akan terus bersama Prabowo, tidak mudah menerima PKS menjadi bagian dari keluarga besar Koalisi Indonesia Raya. Jika pun Anies masuk ke putaran kedua (lagi-lagi dengan asumsi sudah terdaftar sebagai capres) vis a vis Ganjar dan pasangannya, tidak mudah membawa Gerindra dan koalisinya ikut bersama Koalisi Perubahan. Tetapi, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Semua serba mungkin dan mungkin segalanya mungkin.

Sebagai catatan akhir, jika sosok Anies disepakati sebagai representasi dari kekuatan Islam politik dengan dukungan terutama dari PKS belum berhasil menjadikan Anies sebagai presiden, maka tesis dan prediksi sosiolog Vedi R Hadiz akan benar pada ujungnya, yaitu bahwa Islam politik selalu mengalami kegagalan yang beruntun (countinual failure) sepanjang sejarah republik.

Dan, itu artinya, jika kita membicarakan kekuatan Islam dalam politik Indonesia adalah kekuatan „Islam moderat” yang selalu akomodatif dengan kekuatan nasionalis dan itulah Islam Indonesia yang berbeda dengan konsepsi dan aktualisasi „Islamis-transnasional” seperti yang dicerminkan oleh PKS. Bahkan, Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai anak kandung dari Masyumi di bawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra mudah berdialog dengan kubu nasionalis.

Saya tidak tahu, apakah Partai Gelora yang merupakan pecahan dari PKS--setidaknya dari tokoh-tokoh kuncinya seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahmud Sidiq--telah mengalami kesadaran nasional tentang pentingnya kembali ke „tengah” setelah sekian lama berada di „kanan”. Wallahu a'lam bi al-shawab. ●

Dr. Abdul Mukti Ro'uf, MA
dosen Filsafat di Pascasarjana
IAIN Pontianak, pemerhati
contemporary Islamic thought dan
sosial keagamaan

Pemprov Sumsel Gelar Malam Resepsi Kenegaraan dan Ramah Tamah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Malam Resepsi Kenegaraan dan Ramah Tamah bersama masyarakat, bertempat di Griya Agung, Kamis 17 Agustus 2023).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 Tahun 2023.

Hadir dalam acara ini diantaranya para pejuang kemerdekaan Veteran, Purnawirawan, Wredatama, Warakawuri, Angkatan 45, Generasi Muda dan Paskibraka.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru yang hadir didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Selatan Hj. Feby Herman Deru mengatakan upacara penaikan dan penurunan bendera merupakan wujud nyata kecintaan terhadap bangsa dan negara. Juga sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang yang telah berkorban untuk meraih kemerdekaan.

"Musuh besar kita adalah ketidakpedulian dengan lingkungan sekitar, cenderung



individual. Musuh kedua adalah terbukanya informasi yang nyaris liberal, dunia ini sudah tidak berpagar," ujar HD.

Untuk itu menurut HD, selain pendidikan secara umum, pagar kita dalam membentuk karakter

generasi muda adalah dengan agama dan meneladani karakter para pejuang.

"Kita mengucapkan terima kasih kepada para pejuang yang telah berjuang untuk kemerdekaan yang didapat

dengan gotong royong. Patut kita teladani sifat-sifat kepahlawanan seperti cinta tanah air, rela berkorban, percaya pada kemampuan sendiri, tanggung jawab dan dapat diterapkan pada era saat ini," ujar HD. (*)

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-78 begitu hidmat dilakukan warga melalui upacara pengibaran bendera merah putih di Perumahan Griya Bersama Talang Jambi, Sukarami, Palembang, Kamis (17/08/2023).

Momen sukaria dan hidmat dirasakan oleh para peserta upacara, dimana RM Riyan Zakaria yang merupakan politisi Partai Nasdem Kota Palembang, selaku pemimpin upacara menyampaikan banyak pesan dan mengingatkan agar sesama warga jaga kebersamaan, jaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keamanan dan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diawali dengan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul hari ini. Kata Raden Muhammad Riyan Zakaria dalam awal amanatnya.

"Semoga semangat kemerdekaan ini dapat kita tumbuh kembangkan dalam jiwa kita semua. Salah satunya yang saya sangat apresiasi dan banggakan adalah upacara peringatan HUT RI yang ke 78 oleh warga griya bersama yang menunjukkan rasa patriotisme yang sangat tinggi," ajak RM Riyan Zakaria.

Momen Ikatan Harmonis Bersama Warga



Dilanjutkannya, Semoga semangat ini terus bertumbuh dari waktu ke waktu karena mempertahankan kemerdekaan dengan hal hal positive adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai rasa sukacita memperingati hari lahirnya kemerdekaan RI, sehingga dalam melaksanakan gelar upacara itu

semuanya dilaksanakan oleh warga Griya Bersama dengan peran dan tugasnya masing masing, Pemimpin upacara dipimpin oleh Dani, petugas pembawa Bendera Merah Putih dilaksanakan oleh Ella, Rita, dan Yusmita. Sedang petugas komandan regu masing masing dikomandoi Eko, Iis, dan Akmal. Untuk Pembaca UUD 1945 oleh

Tantri, dan pembaca naskah Pancasila diucapkan oleh Krisna dengan pembimbing acar Evita. Sedangkan RM Riyan Zakaria selaku Inspektur Upacara.

"Tetaplah semangat dalam bekerja, kedepankan rasa kekeluargaan, pupuklah terus rasa gotong royong kita dalam mewujudkan pembangunan di kota Palembang ini," tutur RM Riyan mengingatkan.

Dijelaskan RM Riyan Z, bahwa masih banyak tantangan-tantangan kedepan dalam menuju dan mewujudkan masyarakat yang berkehidupan yang layak dan berkeadilan dalam semua hal.

Maka untuk itu, lanjutnya, jaga persatuan dan kebersamaan untuk mencapai apa yang kita cita citakan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Merdeka !!," Tutup RM Riyan Zakaria.

Usai upacara digelar acara dilanjutkan penyerahan bantuan hadiah bagi pemenang lomba kegiatan HUT RI Ke 78 oleh RM. Riyan Zakaria kepada warga. J2

Gubernur Sumsel Kukuhkan Paskibraka

Gubernur Sumsel H Herman Deru secara resmi mengukuhkan 50 orang (25 putra dan 25 putri) anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sumsel Tahun 2023.

Pengukuhan Paskibraka tersebut ditandai dengan upacara pengukuhan yang digelar di Griya Agung Palembang, Selasa (15/8) malam.

Sebanyak 50 anggota Paskibraka tersebut akan bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78 Tahun di halaman Griya Agung pada, Kamis 17 Agustus 2023 mendatang.

Para Paskibraka yang dikukuhkan tersebut merupakan siswa dan siswi terpilih utusan berbagai sekolah yang ada di 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel.

Tak hanya mengukuhkan, Gubernur Sumsel H. Herman Deru juga menyemangati para anggota Paskibraka. Ia menyalami satu persatu anggota sesaat usai dikukuhkan dan mendoakan agar para anggota Paskibraka ini sukses dalam melaksanakan tugas mengibarkan bendera



merah putih pada puncak peringatan HUT RI 17 Agustus mendatang.

Usai dikukuhkan, para anggota Paskibraka ini melakukan beberapa atraksi di hadapan Gubernur Sumsel H. Herman Deru serta Forkopimda yang hadir.

Kepala Badan Kesbangpol

Provinsi Sumsel Dr. H. Al Fajri Zabidi mengatakan 50 orang siswa siswi ini merupakan Paskibraka Provinsi Sumsel yang telah melalui latihan kepemimpinan dan latihan praktek pengibar bendera.

"Hari ini kita telah menyelesaikan pemusatan diklat bagi Calon Paskibraka dengan selamat. Untuk itu sudah



sepantasnya bila kita bersyukur kepada Al-Khalik karena kita berhasil menyelesaikan latihan ini," jelasnya. (hms)

HD Tinjau Venue Porprov XIV di Lahat



Gubernur Sumsel H. Herman Deru meninjau langsung sejumlah venue yang rencananya akan digunakan pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke XIV di Kabupaten Lahat, Rabu (16/8).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan Kabupaten Lahat sebagai tuan rumah.

Diketahui, sejumlah persiapan terus dimatangkan jelang pelaksanaan Porprov tersebut. Termasuk kesiapan venue dan waktu pelaksanaannya.

"Jadwal pelaksanaan Porprov di Kabupaten Lahat ini tidak ada pengunduran dari jadwal semula. Persiapan harus diselesaikan dengan seksama," kata Herman Deru usai peninjauan tersebut.

Menurutnya, kesiapan kabupaten Lahat sebagai tuan rumah tinggal dalam tahap penyempurnaan.

Sementara untuk persoalan cabor, Herman Deru berpesan kepada KONI Provinsi dan kabupaten Lahat untuk melakukan peninjauan kembali ukuran pelaksanaan setiap cabor.

Disisi lain, Herman Deru juga mengingatkan soal kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Mulai dari penginapan hingga transportasi.

Tidak hanya itu, lanjutnya, sektor keamanan juga menjadi faktor penting suksesnya Porprov di Kabupaten Lahat ini.

"Pihak keamanan seperti Polri, TNI, dan lainnya harus memetakan titik-titik yang harus dijaga ketat sehingga atlet semakin nyaman mengikuti pertandingan," ujarnya.

Terlebih, Herman Deru menyebut, Porprov tersebut juga dapat menjadi sarana bagi Kabupaten Lahat untuk

meningkatkan dan mengenalkan potensi sektor pariwisatanya.

Untuk diketahui, dalam peninjauan itu ada sejumlah venue yang disambangi Gubernur Herman Deru diantaranya, GOR Bukit Tunjuk, venue voli pantai Pagar Agung, Dodik Secaba/Secata Putang Lahat, dan venue di eks Terminal Batai Lahat.

Porprov tersebut sendiri direncanakan tetap akan digelar pada 17-24 September 2023 mendatang.

Sementara Bupati Lahat Cik Ujang menyatakan kesiapan Kabupaten Lahat sebagai tuan rumah. (hms)





Panen GSMP

Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD bersama Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj Fauziah MY, Senin (14/8) pagi, berkesempatan melakukan panen Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) di lahan GSMP milik warga Kampung Sugiwaras Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame Palembang.

Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru menegaskan, kedatangannya tidak lain ingin ikut melakukan panen di lahan GSMP milik warga Kampung Sugiwaras sekaligus sebagai bentuk apresiasi pihaknya terhadap upaya yang telah dilakukan warga setempat dalam menggalakan GSMP.

"Kami sengaja ikut panen bersama ibu-ibu untuk bertemu masyarakat disini. Kami apresiasi atas kerja kolektif ibu-ibu dalam melakukan kegiatan tanam-menanam kebutuhan rumah tangga," kata Feby. (hms)

DPRD Palembang Gelar Rapat Paripurna Bahas KUA dan PAS 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan II tahun 2023 membahas Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 Walikota Palembang bersama DPRD kota Palembang, Sabtu (12/8/2023).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, SH. Hadir langsung Wali Kota Palembang H. Harnojojo, para Asisten serta Forkompinda di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Sebelum Penandatanganan Nota KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, Walikota Palembang bersama DPRD Kota Palembang menyampaikan hasil rapat Banggar yakni Pendapatan Daerah Rp 4.072.984.630.702, Belanja Daerah Rp 4.075.488.106.460, Surplus/defisit Rp 2.493.475.765, Pembiayaan netto Rp 2.490.475.765 dan sisa lebih

pembiayaan tahun



berkenan nihil.

Harnojojo menuturkan, kondisi rancangan 2024 sebagai berikut; pertama, karena belum ada penetapan alokasi dari pemerintah pusat untuk dana transfer ke daerah untuk tahun 2024 dan dari pemerintah provinsi untuk dana bagi hasil pajak provinsi, maka Pemkot baru menargetkan pendapatan daerah yang bersifat rutin dari dana transfer tersebut sesuai dengan alokasi tahun 2023.

Kedua, untuk rencana belanja daerah pemerintah kota tetap memprioritaskan alokasi bidang pendidikan urusan bidang kesehatan dan prioritas

pembangunan baik nasional provinsi maupun prioritas pembangunan daerah Kota

Palembang.

Sedangkan ketiga, dari sistem pembiayaan daerah untuk target penerimaan yang bersumber dari sisa perhitungan tahun anggaran 2023 merupakan estimasi sementara dan akan disesuaikan pada perubahan APBD.

Berdasarkan kondisi tersebut lanjut Harnojojo, telah dicapai kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Palembang tentang penjelasan pendapatan daerah pada APBD tahun 2024. (Adv)

Gunungan sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan yang berada di Jalan Noerdin Panji, Kecamatan Sukarame Palembang, Senin (14/8/2023) terbakar.

Pusat pembuangan sampah utama bagi kota Palembang yang luasnya 25 hektar itu, sempat mengagetkan warga sekitar. Karena api yang semula dianggap tidak berbahaya itu, justru membesar dan meluas.

Warga yang berdomisili sekitar TPA tersebut meminta pihak terkait bertanggung jawab dan secepatnya menangani kejadian ini. Mereka takut kebakaran ini akan meluas dan berdampak pada warga sekitar, serta menimbulkan polusi karena kepekatannya asapnya.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Kepala Dinas

TPA Sukawinatan Terbakar



Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang, Dr. Akhmad Mustain, mengaku telah menerima laporan dari warga. Sebagai tindak lanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran telah mengerahkan beberapa unit kendaraan Damkar ke lokasi kebakaran.

Dalam keterangannya, Mustain menyatakan masih mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Namun diduga ada yang sengaja membakar serpihan-serpihan kecil dan tak akan menyangka apinya akan membesar. Ditambah lagi cuaca panas yang menyebabkan sampah-sampah non organik yang kering dan mudah dilalap api. (*)



Medium

Diterbitkan : PT. Aufar Media Dzakira
SK. Menkumham Nomor AHU-24720 Tanggal 15 Desember 2015
Akta Notaris Dewangga Bharline, SH., MKn / Nomor 3

KOMISARIS: H. Syahril Fauzi, DIREKTUR: Desty, PEMIMPIN UMUM/PERUSAHAAN: Desty,
PIMPINAN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Fahlepi Senopati,
STAF REDAKSI: Pudiyaka, Ahmad Subari, Syahril Fauzi, Armin Pani, Hajar Idris, Rusmin, Arlen M, Antoni Razendra, Ardiansyah Saputra, Dino Martin, Rahayu Dea, Rizky Ramadhan, M. Anton.

ALAMAT REDAKSI: Jl. Kelapa Gading Talang Kelapa No. 22 Blok Lantana Perumnas Talang Kelapa Palembang, Telp. (0711) 5724533
Hp.0812.7907. 6696, E-mail: medium1717@gmail.com **MANAGER KEUANGAN:** Ida H. Bahrin **BAGIAN IKLAN:** Sumiati **BAGIAN PEMASARAN:** Ayu **BAGIAN PRACETAK:** Ahmad Kurniawan **BAGIAN WEB, AE & EVENT:** Hellen Septikahani **BAGIAN UMUM:** Merry Angraini **BAGIAN KOLEKTOR:** Firman **PERCETAKAN:** CV. Selaras **ALAMAT PERCETAKAN:** Jl. AKBP HM Amin 406 (Belakang International Plaza) Palembang

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Tabloid Medium dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun serta dengan alasan apapun.

Bukan lagi sesuatu yang tabu lagi, ketika kita menemukan tradisi yang dianut oleh orang-orang pada agama lain, menjadi kebiasaan sebagian orang Islam. Harapan dapat ditekan sejalan dengan makin banyaknya intelektual Islam yang memiliki ilmu pengetahuan keislaman, nyatanya kesalahan-kesalahan itu malah justru terus berkembang.

Dapat dilihat pada berbagai kebiasaan yang menjadi tradisi yang susah dilepaskan oleh masyarakat. Misalnya, pada saat upacara pernikahan keluarga Islam, sebelum ijab qobul (akad nikah), pasangan pengantin telah disandingkan. Dalam Islam peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi, sebab pasangan itu belum dinikahkan. Mereka boleh bersanding setelah dilakukan akad nikah.

Dalam Islam jangankan berdekatan, berpandangan saja pun telah menimbulkan dosa. Sebagaimana firman Allah yang artinya : "Wahai Muhammad, perintahkan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mata mereka ketika berhadapan dengan perempuan bukan mahramnya dan menjaga kemaluan mereka dari zina....." ((QS. An Nur : 30).

Lalu ayat berikutnya....." Wahai Muhammad perintahkan kepada perempuan-perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangan mata mereka ketika berhadapan dengan laki-laki bukan mahramnya. Dan menjaga kemaluan mereka dari zina, Jangan mereka menampakkan leher dan bahagian dada mereka....." (QS. An Nur : 31).

Prof Dr Ahmad Zahro, Rektor Unipdu Jombang yang juga guru besar hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, menuliskan artikel pada laman akunnnya, bahwa secara etika, duduk bersanding di hadapan penghulu bukan tradisi Islam. Ia mengancam bahwa kebiasaan demikian sebagai budaya Barat yang harus difilter oleh orang Islam bukan malah ditiru. Kalaupun itu dibumikan di Indonesia, Zahro menganggap tidak pantas. "Ya tidak pantaslah ditiru oleh orang Islam Indonesia," imbuhnya. Keduanya disandingkan tidak memiliki keuntungan. "Apa sih untungnya disandingkan. Yang ada malah mudlaratmya," katanya.

Demikian juga tradisi berpakaian hitam pada saat ada keluarga atau sahabat maupun handaitolan yang meninggal. Tradisi semacam ini bukanlah tradisi umat Islam, melainkan agama lain yang memang ada makna tersendiri dari pakaian hitam itu. Ada pendapat para ulama bahwa pakaian hitam saat menjenguk orang yang meninggal, untuk mencegah giliran kemalangan pada keluarga berikutnya. Dalam Islam pemahaman seperti ini tentu



Janganlah Pakai Tradisi Orang Lain

Janganlah Pakai Tradisi Orang Lain

tidak ada.

Jangan Pakaian Hitam

Ulama madzhab Hanafi melarang pakaian hitam selain suami/istri yang ditinggal mati. Demikian ulama madzhab Maliki. Adapun Imam Qulyubi seorang ulama madzhab Syafi'i mengharamkan busana hitam, apabila warna hitam dianggap mewah. Menurut Imam Nawawi seperti yang dinukil dari Imam Mawardi dalam kitab 'Al-Hawi' tentang pakaian hitam dalam kontek ihdad berkata: "berbusana hitam ketika ta'ziah apabila ditujukan sebagai tanda belasungkawa bagi peta'ziah tidak diperbolehkan. Hal itu merupakan sesuatu yang buruk dan dibenci.

Begitu juga dengan persoalan tabur bunga di atas pekuburan. Seorang ulama hadits Mesir, Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan, "Perbuatan ini digalakkan oleh kebanyakan orang, dan tidak tidak memiliki sandaran agama Islam. Sikap menabur bunga di atas kuburan adalah sikap berlebih-lebihan dan sikap mengekor kebiasaan kaum Yahudi. Apa yang terjadi, khususnya di negeri Mesir sebagai contoh. Orang Mesir pun melakukan tradisi tabur bunga di atas pusara atau saling menghadihkan bunga sesama mereka. Orang-orang meletakkan bunga di atas pusara kerabat

atau kolega mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah wafat."

Syaikh Ahmad Syakir melanjutkan, "Oleh karena itu, apabila para tokoh muslim mengunjungi sebagian negeri Eropa, anda dapat menyaksikan mereka menziarahi pekuburan para tokoh di negeri tersebut atau ke pekuburan para pejuang tanpa nama kemudian melakukan tradisi tebar bunga, sebagian lagi meletakkan bunga imitasi karena mengekor Inggris dan mengikuti tuntunan hidup kaum terdahulu." Lalu di akhir perkataan, beliau menyatakan, "Semua ini adalah perbuatan bid'ah dan kemungkaran yang tidak berasal dari agama Islam, tidak pula memiliki sandaran dari Al quran dan sunnah Nabi. Dan kewajiban para ulama adalah mengingkari dan melarang segala tradisi ini sesuai kemampuan mereka." (Ta'liq Ahmad Syakir terhadap Sunan At Tirmidzi).

Tiup Lilin Pula

Acar tiup lilin dan merayakan ulang tahun, dalam Islam bukanlah suatu kegiatan yang dianjurkan. Karena tradisi ini biasanya dilakukan oleh kaum kafir atau Yahudi. Bahkan dalil-dalil syariat dari al-Qur'an dan as-sunnah telah menunjukkan bahwa perayaan hari kelahiran merupakan perbuatan bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama dan merupakan

penyerupaan (tasyabbuh) dengan musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi, Nashrani dan lain-lainnya.

Maka hendaknya para pemeluk Islam meninggalkannya dan mewaspadainya serta mengingkari orang yang melakukannya, dan tidak ikut menyebarkan atau mendukung orang-orang yang mempropagandakannya atau yang mengisyaratkan pembolehanannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi WaSallam dalam hadits shahih. "Barangsiapa melakukan suatu amal yang tiak kami perintahkan, maka hal itu tetolak." (HR. Muslim). "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." (HR. Muslim).

Sebagian ahlu ilmi (ulama) menyebutkan, bahwa yang pertama kali menyelenggarakan hari ulang tahun kelahiran ini adalah golongan Syi'ah Fathimiyah pada tahun 400 Hijriyah, kemudian diikuti oleh sebagian orang yang mengaku ahlu sunnah karena kejahilan mereka dan karena menurut golongan Syi'ah, Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya perbuatan bid'ah ini menyebar luas. Maka hendaknya ulama kaum Muslimin menghindarinya.

Demikian banyak kegiatan atau tradisi agama lain, baik Yahudi maupun Nasrani yang kini berkembang lalu diikuti oleh sebagian orang-orang Islam. Hendaknya ini menjadi pemikiran untuk mengembalikan tradisi keislaman bagi ummat Islam dan menghindari tradisi pemeluk agama lain. Karena apa yang dilakukan itu tak beda dengan melakukan kemungkaran yang diharamkan dalam agama Islam.

● Bangun Lubis

Apa yang terjadi jika seseorang mengalami gagal ginjal? Ya, ini berarti sekira 85 persen hingga 90 persen fungsi ginjal hilang atau tidak bekerja dengan cukup baik untuk membuat seseorang tetap hidup.

Kondisi ini semakin parah lantaran tidak ada obat untuk gagal ginjal. Namun, pengobatan untuk hidup lebih lama masih memungkinkan.

Jadi, penting untuk mencegah terjadinya gagal ginjal sejak dini. Berikut ini 10 cara mencegah gagal ginjal, dikutip Healthline pada Selasa (8/8/2023).

1. Makan makanan yang menyehatkan jantung Pola makan yang menyehatkan jantung, diet rendah gula dan kolesterol serta tinggi serat seperti biji-bijian utuh, serta buah dan sayuran membantu mencegah penambahan berat badan.

2. Kelola gula darah Diabetes meningkatkan risiko penyakit jantung dan gagal ginjal. Hal ini

Penyakit Jantung Rematik atau biasa juga dikenal dengan nama Rheumatic Heart Disease (RHD) adalah komplikasi dari penyakit demam rematik yang menyebabkan kerusakan katup jantung. Penyebab dari RHD berasal dari reaksi autoimun terhadap infeksi bakteri Streptokokus grup A, yang terdapat pada sistem kekebalan tubuh yang tidak diobati.

Pada umumnya, penderita penyakit ini kerap ditemukan di negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan rentang usia 30 - 40 tahun. Nah, berikut 4 solusi atasi penyakit jantung rematik di antaranya:

1. Wajib Segera Ditangani dengan Baik

Penyakit jantung rematik adalah salah satu masalah kesehatan yang serius dan dapat mengancam nyawa, oleh karena itu pasien penderita penyakit ini perlu berobat dan ditangani dengan baik.

Apabila pengobatan tidak dilakukan dengan tepat, maka pasien kemungkinan dapat mengalami kerusakan fungsi katup mitral jantung. Akibat dari kerusakan katup mitral pun dapat menimbulkan masalah pada sirkulasi darah di tubuh, dan berpotensi menyebabkan gagal jantung ataupun komplikasi serius lainnya.

2. Prosedur Bedah Mitral Valve Replacement

Mitral Valve Replacement atau operasi penggantian katup jantung merupakan salah satu cara menangani kasus kerusakan katup mitral jantung. Prosedur ini dilakukan dengan cara bedah dan mengganti katup mitral yang rusak dengan katup buatan ataupun donor katup.

3. Manfaat Mitral Valve Replacement Bagi Pasien RHD Dengan menjalani prosedur

10 Cara Mencegah Gagal Ginjal



merupakan salah satu alasan untuk mengelola gula darah.

3. Kelola tekanan darah Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung serta gagal ginjal.

4. Pertahankan berat badan yang sehat Obesitas dapat meningkatkan risiko kondisi yang berhubungan dengan gagal ginjal, seperti diabetes dan tekanan darah tinggi.

5. Kurangi asupan garam Makan terlalu banyak garam dikaitkan dengan tekanan darah tinggi.

6. Minum air yang cukup Dehidrasi mengurangi aliran darah ke ginjal, yang berakibat pada kerusakan. Tanyakan kepada dokter berapa banyak air yang harus diminum per hari.

7. Jangan merokok Merokok mengurangi aliran darah ke ginjal. Merokok dapat merusak fungsi ginjal pada orang dengan atau tanpa penyakit ginjal. ●

(Artikel ini telah diterbitkan SINDOnews.com pada Selasa, 08 Agustus 2023)

4 Solusi Atasi Penyakit Jantung Rematik



Mitral Valve Replacement, pasien RHD dapat menikmati berbagai manfaat seperti menghilangkan gejala-gejala tidak nyaman, meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah dan mengurangi terjadinya komplikasi serius seperti gagal jantung, infeksi katup jantung, maupun kerusakan organ lain yang dapat disebabkan oleh aliran darah yang tak lancar.

4. Tindakan Mitral Valve Replacement di Mayapada Hospital Surabaya Operasi Mitral Valve Replacement sendiri sudah pernah berhasil dilakukan di Mayapada Hospital Surabaya. Operasi ini

dilakukan pada salah satu pasien laki-laki berusia 42 tahun, yang memiliki keluhan rasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat, sesak nafas dan juga nafas terasa berat.

Dari keluhan, konsultasi, dan pengecekan lebih lanjut, laki-laki tersebut diketahui mengalami kebocoran katup pada jantung dan akhirnya menjalani operasi Mitral Valve Replacement. Operasi ini ditangani oleh dr. Yan Sembiring, Sp.B, Sp.BTKV, Subsp. VE (K), selaku Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardio dan Vaskular di Mayapada Hospital Surabaya.

Dr. Yan menjelaskan secara

teknis, pada prosedur Mitral Valve Replacement, fungsi alami jantung pada pasien dihentikan sementara dan diambil alih sementara oleh heart-lung machine (Cardiopulmonary Bypass Machine). Kemudian katup mitral pada jantung yang rusak diangkat dan digantikan dengan katup buatan dari logam.

"Melihat dari kondisi medis dan usia pasien masih tergolong muda, kami memutuskan untuk memasang katup buatan dari logam yang dapat bertahan 20 sampai 30 tahun ke depan. Setelah tindakan berhasil dilakukan, pasien mengalami perbaikan signifikan dan pasien dapat beraktivitas kembali tanpa keluhan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2023).

Hingga saat ini, pasien masih dalam proses pemulihan. Pasien juga dipantau secara intensif dan diberikan obat-obat khusus untuk mengurangi risiko infeksi serta terjadinya pembekuan darah. Pasien telah menjalani proses secara menyeluruh mulai dari deteksi, diagnosis, dan tindakan Mitral Valve Replacement pada bulan Juni di Cardiovascular Center Mayapada Hospital Surabaya.

Sebagai informasi, Mayapada Hospital Surabaya salah satu rumah sakit terbaru dari Mayapada, secara perdana telah sukses melakukan tindakan operasi Mitral Valve Replacement. Mayapada Hospital Surabaya terlibat penuh dalam tindakan operasi, persiapan, hingga proses pemulihan pasien pasca operasi.

Jika Anda ingin melakukan konsultasi lebih lanjut, Cardiovascular Center tersedia di seluruh unit rumah sakit Mayapada, dan siap untuk memberikan penanganan berbagai kasus jantung secara komprehensif. ● (dth)

Beberapa pekan lalu Sistem PPDB (Penerimaan Sistem Didik Baru) kembali menuai protes orang tua murid dan Kepala Daerah. Kusutnya PDDDB yang sudah berjalan selama 7 tahun ini diwarnai kecurangan hingga sekolah yang kekurangan murid. Organisasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat ada beberapa masalah utama yang membuat PPDB tahun ini keruh.

“Yang pertama terkait, kondisi sekolah kita itu memang tidak merata distribusi atau apa namanya sebarannya di daerah-daerah di Indonesia karena kan memang demografis kita juga demikian kemudian juga terkait dengan geografis kita juga sangat luas sekali Nah ketidakmerataan sekolah negeri di wilayah Indonesia itulah yang menjadi salah satu persoalan pokoknya,” kata Satriawan Salim Koordinator P2G, Senin (31/7/2023).

Satriawan menjelaskan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan berdampak sistem PPDB. Daya tampung sekolah tidak sebanding dengan jumlah siswanya.

“Akibatnya anak-anak yang pengen masuk negeri ini nggak bisa semua terserap di sekolah negeri, terpaksa mereka masuk ke sekolah swasta dan itu berbayar. Persoalan kedua akibat tidak meratanya sebaran sekolah negeri di daerah-daerah mengalami kekurangan siswa, bahkan tidak ada siswa yang mendaftar,”

masalah berikutnya terkait label sekolah unggulan dan favorit. Stigma itu membuat orang tua murid berlomba-lomba memasukkan anaknya di sekolah tersebut. Sebab, seperti diketahui bahwa label itu diimbangi dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai.

“Karena sekolah itu dinilai oleh orang tua sebagai sekolah bagus, sekolah unggulan,” tuturnya.

Satriawan mengatakan seharusnya sistem PPDB meminimalisir masalah itu dengan jalur zonasi, afirmasi dan prestasi. Namun dalam pelaksanaan tidak semulus teori di atas kertas.

“Dalam perjalanannya banyak anak-anak yang miskin justru tidak bisa bersekolah di sekolah negeri. Padahal afirmasi itu menjadi substansi dari kebijakan PPDB ini, bagaimana keberpihakan negara kepada anak-anak yang tidak mampu sehingga mereka mendapatkan keadilan dalam pendidikan dan yang kedua, zonasi ini sangat ramah anak mestinya meringankan beban orang tua dari segi biaya pendidikan sekolah,” jelasnya.

Satriawan menilai tujuan dari sistem PPDB sudah bagus dalam dunia pendidikan. Namun Kemendikbud Ristek dan Pemerintah Daerah sebagai pemangku pelaksanaan sistem PPDB tidak tegas dalam



Saling Lempar Perkara Kisruh Sistem Zonasi



pelaksanaannya. Meski persentase jalur dalam sistem PPDB hingga batasan usia didik telah diatur oleh Kemendikbud Ristek, namun Satriawan menilai bahwa aturan itu masih banyak dilanggar.

“Memang diperkenankan usia tua itu. Tetapi persoalannya begini kalau sudah kayak SMA usia 19, 20, 21 meskipun oleh peraturan diperkenankan masuk ke sekolah formal lewat PPDB gitu ya dan diterima gitu, tapi kan mereka bukan usia anak lagi kan mestinya. Nah, kenapa mereka tidak mengambil paket C saja misalnya? Paket C atau PKBM ya, pendidikan berbasis masyarakat, itu kan pendidikan non formal yang juga diakui oleh negara, oleh pemerintah,” tuturnya.

Satriawan pun menilai dalam pelaksanaan PPDB perlu ada evaluasi yang pasti. Tanpa harus mengesampingkan tujuan baik dari sistem untuk pemerataan pendidikan dan kualitas guru.

“Harus ada ketegasan dari

Kemendikbud Ristek dan kesamaan pandangan frekuensi antar pemerintah daerah dengan Kemdikbud. Pengeksekusi kayak gini lho, cita-cita awalnya gitu. Jadi jangan ributnya itu setelah PPDB ribut, rame.

Setelah PPDB ribut, begitu terus kan? setiap tahun seperti itu, kita jadi malu,” tuturnya.

Kemendikbud Ristek Dorong Pemda Benahi Sistem Pendidikan

Di sisi lain, Irjen Kemendikbud Ristek Chatarina Girsang menilai bahwa kisruh sistem PPDB terjadi karena kesenjangan sistem pendidikan serta infrastruktur di tingkat daerah.

Kendati demikian, Chatarina katakan bahwa hal itu merupakan tanggung jawab Pemda.

“Karena itu hak pendidikan mereka, sudah dijamin konstitusi,” tuturnya.

Chatarina mengatakan tiap tahun jelang tahun ajaran baru selalu ada sosialisasi pelaksanaan sistem PPDB dengan dinas pendidikan di daerah. Namun ia memaklumi kalau dalam pembuatan Juknis PPDB akhirnya meleset dari tujuan awal.

“Masalahnya bahan sosialisasi

hanya masuk ke laci. Walaupun kita minta kepala, kelompok kerja, kepala sekolah, gitu ya, tolong sampaikan kepada teman-teman bapak ibu yang tidak hadir bahan kami ini, saya share semua bahan paparannya. Nah tadi ada yang masuk laci mungkin, ada yang salah memahami atau ketika sosialisasi juga nggak dengar, sibuk main hp-lah segala macam lah jadi ada yang nggak fokus gitu ya jadi kita kan nggak mungkin bisa memastikan bahwa mereka paham,” tuturnya.

Chatarina mengaku heran kalau ada siswa-siswi yang tidak masuk sekolah negeri karena usia lebih muda, meskipun rumahnya masuk dalam zonasi sekolah. Padahal ia katakan dalam Permendikbud Tahun 2021 itu telah diatur secara jelas persentase dan urutan seleksi untuk sekolah negeri.

“Jadi (Umur) ini untuk memperebutkan bangku yang paling terakhir. Yang diseleksi dengan umur,” tuturnya.

Adapun penilaian polemik PPDB karena Kemendikbud Ristek tidak tegas dalam sikapnya, Chatarina mengatakan sistem ini telah dilakukan sosialisasi hingga ke pelosok daerah. Kalaupun pihaknya tidak tegas, karena tidak punya kewenangan dalam berikan sanksi.

“Karena kan yang melakukan sebenarnya pemerintah daerah. Yang punya kewenangan Kemendagri. Kita sifatnya hanya memberi rekomendasi,” tutupnya.

● (dtn)

Fraksi DPRD Provinsi Sumsel Menerima Jawaban Gubernur

Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Sumsel menyatakan menerima jawaban gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2023.

Jawaban gubernur tersebut merupakan tanggapan atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Sumsel TA 2023.

Semula, pimpinan dan anggota dewan mendengarkan penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi dimaksud oleh Gubernur Sumsel, yang dibacakan Wakil Gubernur Sumsel; Ir. Mawardi Yahya pada Rapat Paripurna yang disampaikan pada Senin, (07/08/2023).

Rapat Paripurna LXVII (67) dengan agenda Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dipimpin



Jawaban Gubernur Sumatera Selatan terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi terkait Rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Sumsel TA 2023, disampaikan Wakil Gubernur Sumsel Ir. Mawardi Yahya pada Rapat Paripurna LXVII (67) pada Senin, (07/08/2023).

praktik pungutan biaya yang tinggi khususnya terhadap sekolah menengah atas negeri akan menjadi perhatian kami. Sedangkan adanya pembiayaan bulanan berdasarkan keputusan komite, dapat dijelaskan bahwa hal ini telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komite Sekolah, dimana pembiayaan

di satuan Pendidikan melalui komite merupakan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pendidikan oleh pemerintah,” ujar gubernur.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terimakasih atas apresiasi yang telah diberikan terhadap proses penyusunan Raperda Perubahan APBD TA 2023 yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Setelah penyampaian jawaban gubernur tersebut, masing-masing juru bicara fraksi menganggap jawaban itu telah memenuhi harapan, Rapat Paripurna selanjutnya diskors untuk pembahasan secara teknis pada Komisi-komisi dengan instansi terkait dari tanggal 7 hingga 10 Agustus 2023.

Serta rapat konsultasi Pimpinan Komisi-komisi dengan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. Sumsel membahas Raperda dimaksud tanggal 11 Agustus 2023, yang laporan hasil pembahasannya akan disampaikan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna LXVII (67) pembicaraan tingkat dua mendatang. (Adv)



Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM.

Dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel; Ir. H. Mawardi Yahya, Seretaris daerah; Ir. S.A. Supriyono, Sekretaris DPRD Prov. Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si, serta perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan tamu undangan lainnya.

Mengawali tanggapan atau jawaban, Gubernur Sumsel menyampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap Fraksi-fraksi yang telah menyampaikan tanggapan, saran maupun kritik, dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dan saran dari Fraksi.

Diantaranya mengenai infrastruktur, Pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menyelesaikan jalan-jalan provinsi yang belum selesai. Yang mana kondisinya masih rusak parah dengan mengalokasikan anggaran untuk penangan jalan dan jembatan yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota.

“Selanjutnya terkait terjadinya

